



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 23 September 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Paparan dan progres BNPP terkait dengan situasi terkini Perbatasan antar negara dan antar pulau
Ketua Rapat	: Dr. Dede Yusuf. M. E, ST., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Sekretaris BNPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris BNPP RI, dengan agenda paparan dan progres BNPP terkait dengan situasi terkini Perbatasan antar negara dan antar pulau, hari Selasa, 23 September 2025, dibuka pukul 13.52 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf. M. E, ST., M.I.Pol., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dan Tugas BNPP

- ❑ **UU No. 43/2008** tentang Wilayah Negara (amanat pembentukan BNPP).
- ❑ **Perpres No. 12/2010 jo. Perpres No. 44/2017** tentang BNPP.
- ❑ **Perpres No. 12/2025 (RPJMN 2025–2029)**: pengembangan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) & 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).
- ❑ **Tugas BNPP**: menetapkan kebijakan program, rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan batas negara & kawasan perbatasan.

2. Kondisi Terkini Batas Negara

- ❑ **RI–Malaysia:**
 - Outstanding Border Problems (OBP) di Pulau Sebatik & Sinapad (klaim silang lahan ±127,3 Ha dan 3 desa terdampak di Nunukan).
- ❑ **RI–Timor Leste:**
 - 1 unresolved segment (Noel Besi–Citrana, Kupang).
 - 1 unsurveyed segment (Subina–Oben, TTU).
- ❑ **RI–PNG:**
 - Pilar batas masih renggang → diperlukan perapatan.
 - Kasus penangkapan nelayan Indonesia oleh PNG.

3. Kondisi Terkini Lintas Batas Negara

- ❑ **PLBN eksisting**: 15 PLBN operasional, 3 PLBN carry over, usulan pembangunan 8 PLBN baru.
- ❑ **Jalur ilegal**: masih ada 104 jalur tidak resmi di Kalimantan Barat & 7 jalur di NTT → rawan penyelundupan & tindak kejahatan lintas negara.
- ❑ **Permasalahan PLBN**:
 - Penanganan deportasi, repatriasi PMI, pemulangan jenazah WNI belum optimal.
 - Kementerian Perdagangan belum selesai menyusun regulasi perdagangan perbatasan.
 - Fasilitas pengawasan (X-ray, gamma-ray) perlu revitalisasi.

4. Pembangunan Kawasan Perbatasan

- ❑ Jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Utara, Papua, dan NTT masih belum tuntas.
- ❑ Target pembangunan jalan paralel perbatasan: 768,88 km (677,19 km RI–Malaysia, 91,69 km RI–PNG).
- ❑ Perlu penyediaan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, kantor kecamatan/desa).
- ❑ Pemberdayaan masyarakat perbatasan melalui pendidikan vokasi, bimtek, dan pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan stunting.

5. Kondisi yang Diharapkan

- ❑ **Batas negara:** penyelesaian OBP RI–Malaysia, unresolved segment RI–Timor Leste, perapatan pilar RI–PNG.
- ❑ **Lintas batas:** penutupan/rekayasa 111 jalur tidak resmi, penguatan PLBN dengan konsep *Smart Border Post*, serta pembukaan jalur wisata (PLBN Serasan & Sebatik).
- ❑ **Kawasan perbatasan:** tumbuhnya pusat ekonomi baru berbasis infrastruktur, SDM, dan tata ruang yang lebih jelas.

6. Strategi & Upaya BNPP

- ❑ **Perencanaan:** penyusunan Rancangan Perpres Rencana Induk 2025–2029, penerbitan Peraturan BNPP No. 2/2025 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas & Kawasan Perbatasan.
- ❑ **Koordinasi:** intensifikasi koordinasi dengan anggota BNPP, penguatan pengawasan pilar batas & jalur lintas, pengoperasian PLBN/PLB, profiling jalur tidak resmi.
- ❑ **Evaluasi:** pengukuran indeks pengelolaan batas negara, PLBN/PLB, dan kawasan perbatasan (PPKP & KPP) setiap 6 bulan.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris BNPP RI, dengan agenda paparan dan progres BNPP terkait dengan situasi terkini Perbatasan antar negara dan antar pulau, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Setelah mendengar paparan dari Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan ini Komisi II DPR RI:

1. Mendukung Kebijakan BNPP RI yang transformatif dalam bidang perbatasan negara dari tahap pertama tahun 2025 hingga tahap keempat di tahun 2045 yang menyangkut aspek Keamanan, Pemerintahan, Kesejahteraan, Pemberdayaan, dan Kerja Sama, serta meminta agar Pemerintah konsisten masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
2. Dalam menjaga keamanan negara dan mencegah aktivitas ilegal lintas batas serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat perbatasan serta ketergantungan masyarakat pada akses dan layanan di negara tetangga, dengan ini Komisi II DPR RI mendesak agar Pemerintah melalui BNPP RI untuk memfungsikan Pos Lintas Batas Negara

(PLBN) yang sudah dibangun dan diresmikan tetapi belum berfungsi. Seperti PLBN Sebatik-Kalimantan Utara dan PLBN lainnya. Sehingga diharapkan dengan berfungsinya PLBN, Pemerintah dapat mengejar ketertinggalan dalam pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan publik masyarakat perbatasan serta dapat membangun sentra ekonomi dan bisnis bagi warga sekitar kawasan perbatasan yang dapat menaikkan taraf hidup masyarakat daerah terluar atau kawasan perbatasan.

3. Meminta BNPP RI untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah khususnya dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui program prioritas dalam bidang infrastruktur, pembangunan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan, serta menghadirkan investasi di kawasan perbatasan.
4. Meminta agar BNPP RI dalam pengelolaan batas wilayah negara untuk mewujudkan penyelesaian batas negara, lintas batas dan mengoordinasikan kepada pihak negara luar untuk penyelesaian batas wilayah negara yang belum disepakati antara RI-RDTL (*Unresolved Segments*) serta permasalahan batas yang belum disepakati antara RI-Malaysia (*Outstanding Boundary Problems*). Terhadap masih adanya permasalahan batas antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste yang dalam status diputuskan untuk tidak ada kesepakatan sampai semua isu disepakati, Komisi II DPR RI akan melakukan komunikasi melalui jalur antar Parlemen Negara.
5. Mendorong penguatan BNPP RI sebagai institusi pengelola perbatasan yang memiliki kewenangan dan tugas dalam menjaga integritas teritorial, integritas kebangsaan serta melakukan koordinasi seluruh instansi terkait dan pemerintah daerah setempat dalam membangun dan mengelola kawasan perbatasan hingga mencapai kemandirian yang ke depannya dapat diserahkan dan dikelola oleh pemerintahan di wilayahnya masing-masing.
6. Komisi II DPR RI meminta BNPP RI untuk dapat memanfaatkan Kenaikan Anggaran BNPP RI yang bersumber dari APBN untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dan konflik perbatasan dan menghidupkan Pos Lintas Batas Perbatasan, mengelola dan menjaga perbatasan dari penyelundupan baik barang maupun manusia, serta peningkatan pelayanan publik di perbatasan.
7. Dalam penguatan tugas dan fungsi BNPP RI, Komisi II DPR RI mendukung adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Wilayah Negara dengan tujuan penyesuaian kondisi dan perkembangan permasalahan perbatasan negara Indonesia dengan negara lain saat ini, didahului dengan membuat *academic and legal drafting* tentang penguatan BNPP, termasuk studi perbandingan dengan negara–negara lain, dan menyelenggarakan *Indonesia Border Summit*.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

Dr. DEDE YUSUF. M. E, ST., M.I.Pol.
A-549